

Judul : BP Tapera Jamin Tabungan Pensiunan Cair di Akhir Tahun
Tanggal : Kamis, 09 Juli 2020
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 21



Pembangunan rumah di kawasan Buni Bakti, Babelan, Bekasi, Jawa Barat, 8 Juli lalu.

BP Tapera Jamin Tabungan Pensiunan Cair di Akhir Tahun

Pencairan tabungan perumahan terganjal transisi dari Bapertarum ke BP Tapera.

Ghoida Rahmah

ghoida.rahmah@tempo.co.id

JAKARTA – Pencairan dana tabungan perumahan pensiunan pegawai negeri sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) tersendat.

Deputi Komisiner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Eko Ariantoro, mengatakan pensiunan

belum memperoleh haknya karena terganjal proses transisi pengelolaan dari Bapertarum PNS ke BP Tapera. Menurut dia, ada 230 ribu tabungan pensiunan yang tertunda pencairannya dengan nilai Rp 900 miliar. "Proses pengalihan dana sedang berlangsung. Pencairannya pada triwulan IV 2020," ujar dia kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut Eko, dana tersebut disimpan oleh Kementerian Keuangan.

Dia menjamin seluruh dana tabungan perumahan itu aman dan para pensiunan atau ahli warisnya bisa mendapatkan haknya begitu proses pengalihan pengelolaan selesai.

Eko mengatakan alih kelola tabungan perumahan dilakukan dalam tiga tahap. Proses pertama dilakukan oleh tim likuidasi Bapertarum-PNS yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua, pengalih-

an dana ke BP Tapera. Terakhir, proses pencairan dana untuk pensiunan PNS dan pengelolaan saldo awal tabungan perumahan bagi PNS aktif. BP Tapera akan mengelola tabungan perumahan dengan model kontrak investasi kolektif (KIK).

Sulitnya pencairan dana tabungan perumahan terungkap dari pengaduan yang diterima berbagai lembaga, salah satunya Ombudsman Republik Indonesia. Anggota

Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mengatakan peserta Bapertarum-PNS yang sudah pensiun ingin mengambil tabungannya. "Tapi kemudian dipersulit. Ada pula yang pesertanya sudah meninggal, lalu ahli warisnya yang datang mengadu," kata dia.

Menurut Alamsyah, hal itu tak bisa diabaikan dan harus menjadi prioritas pemerintah serta BP Tapera. Terlebih lagi, kata dia, peserta program ini akan terus bertambah, termasuk dengan mengikutsertakan pekerja dari sektor swasta. "Jadi, langkah pertama, kami minta BP Tapera membereskan kewajiban masa lalu yang masih menggantung."

Keluhan yang sama diterima oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Teman-teman PNS banyak yang mengeluh ke BKN, mengapa mereka tidak mendapatkan uang Bapertarum yang sudah dibayarkan," kata Kepala BKN Bima

Haria Wibisana. Menurut Bima, lembaganya pun telah menyampaikan keluhan tersebut dan berkoordinasi langsung dengan BP Tapera. "Kami akan terus melanjutkan diskusinya."

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Endro Suswantoro Yahman, menyayangkan lambatnya proses transisi yang berlangsung sejak 2018, sehingga berpotensi merugikan peserta program. "Uangnya tidak seberapa, dipotong tiap bulan Rp 7.000, paling dapat Rp 4,5 juta. Bagi orang yang enggak punya, ini besar, apalagi sudah satu tahun lebih," ucapnya. Endro mendorong proses pencairan dilakukan sesegera mungkin untuk memberikan kepastian kepada para peserta program. "Jadi mohon pemerintah tanggung jawab. Tapi belum pensiun *diurusin*. Begitu juga yang sudah pensiun."

Tak Cuma untuk Aparat Sipil

PROGRAM tabungan perumahan bertransformasi seiring dengan alih kelola dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Sebelumnya, program ini hanya diperuntukkan bagi aparat sipil negara (ASN), tapi kini diperluas ke pekerja swasta.

Peralihan Peserta dan Dana Bapertarum ke BP Tapera

	Jumlah Peserta	Dana Tabungan
ASN aktif	4,2 juta	Rp 9,7 triliun
Pensiunan	230 ribu	Rp 900 miliar

Tahap Pengembangan BP Tapera

2020-2021:

BP Tapera akan melakukan proses transisi dari Bapertarum. BP Tapera baru menangani tabungan untuk ASN eks Bapertarum.

2022-2023:

BP Tapera akan memperluas kepesertaan kepada pekerja badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), serta tentara dan polisi.

2027:

BP Tapera akan mewajibkan kepesertaan untuk pekerja swasta.

● GHOIDA RAHMAH